

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GAJAH LIAR DI
TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS**

(Skripsi)

Oleh

BAYU YUSTISIANTO EKAPAKSI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GAJAH LIAR DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Oleh
Bayu Yustisianto Ekapaksi

Konflik gajah liar dan manusia terjadi karena adanya penyempitan habitat, tumpang tindih pemanfaatan lahan dan adanya kesukaan gajah terhadap tanaman yang dikelola masyarakat telah menyebabkan banyak kerusakan lahan perkebunan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48 /Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar dan Balai Taman Nasional Way Kambas sebagai pelaksana teknis dari kebijakan tersebut telah mengeluarkan *Standard Operational Procedures* dalam pelaksanaan penanggulangan konflik gajah liar dan manusia, karena hingga saat ini konflik gajah liar dan manusia masih terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar dan Kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, berfokus pada model implementasi kebijakan diantaranya ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas pada tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi belum terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh, tahap saat gangguan gajah liar terjadi sudah berjalan dengan baik dan tahapan setelah gangguan gajah liar terjadi sudah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan hasil implementasi kebijakan menunjukkan bahwa konflik gajah-manusia mengalami penurunan disetiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala seperti Belum adanya OPD (organisasi perangkat daerah) yang berwenang untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Faktor cuaca yang tidak Menentu (Musim Hujan).

Kata Kunci: Kebijakan, implementasi, penanggulangan gajah liar

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF WILD ELEPHANT PREVENTION IN WAY KAMBAS NATIONAL PARK

By
Bayu Yustisianto Ekapaksi

Wild elephant and human conflicts occur because of habitat narrowing, overlapping land use and the presence of elephant preferences for plants managed by the community has caused a lot of damage to community plantation land. The government issued a policy through the Minister of Forestry Regulation Number: P.48 / Menhut-II / 2008 concerning Guidelines for Addressing Conflicts between Humans and Wildlife and Way Kambas National Park Hall as the technical implementers of the policy issued Standard Operational Procedures in implementing wild elephant conflict prevention and humans, because until now conflicts between wild and human elephants still occur. The purpose of this study was to find out how the implementation of wild elephant control policies and constraints in the implementation of the policy of controlling wild elephants in Way Kambas National Park. The research method used is descriptive qualitative method, focusing on policy implementation models including basic measures and policy objectives, policy sources, characteristics of implementing agents, communication, dispositions and the economic, social and political environment, using data collection techniques with interviews, documentation and observation. The results showed that the implementation of the policy of controlling wild elephants in Way Kambas National Park at the stage before the disturbance of wild elephants had not been carried out properly because there were several activities that had not been carried out thoroughly, the stage when wild elephant disturbances had taken place and the stages after elephant disruption wild happened well. Overall the results of the implementation of the policy show that human-elephant conflict has decreased every year, but in its implementation there are still obstacles such as the absence of an OPD (regional apparatus organization) which is authorized to coordinate with the Provincial Forest Service and uncertain weather factors (Rainy Season)

Keywords: Policy, implementation, prevention wild elephant

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GAJAH LIAR
DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS**

**Oleh
Bayu Yustisianto Ekapaksi**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN GAJAH LIAR DI
TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS**

Nama Mahasiswa : **Bayu Yustisianto Ekapaksi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1416021023**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

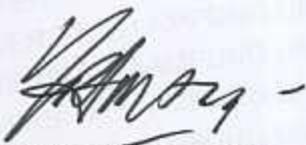
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP. 196211271989021002


Lilih Muflihah, S.IP, M.IP. .
NIK. 231602820509201

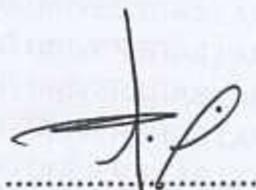
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

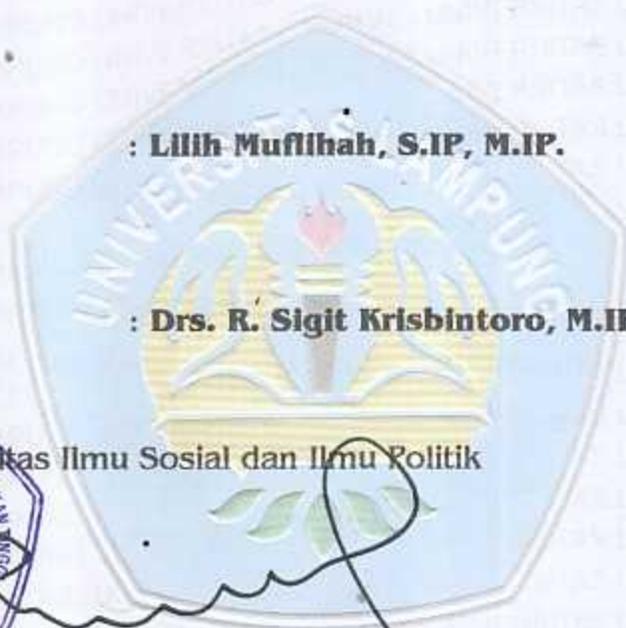
Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si



Sekretaris : Lilih Muflihah, S.IP, M.IP.



Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2019

PERNYATAAN

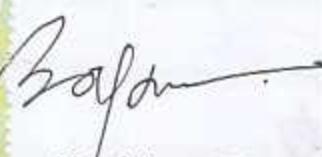
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,




Bayu Yustisianto Ekapaksi
NPM. 1416021023

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bayu Yustisianto Ekapaksi, dilahirkan di Branti Raya 10 Desember 1996, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra pasangan Bapak Ismaji dan Ibu Supriatin. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Al-Mutaqqin Perkemas yang diselesaikan Tahun 2002.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan yang diselesaikan tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis mengenyam pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2014.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur tes PMPAP pada tahun 2014, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2017 di bulan Januari, penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka

(Q.S. Ar-Ra'du : 11)

Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu

(HR. Muslim)

Lebih baik mencoba meskipun gagal, memaksakan bukan berarti ceroboh, karna diam tidak akan menghasilkan apa-apa

(Bayu Yustisianto Ep)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Ku Persembahkan Karya ini
Kepada

Kedua orang tuaku tercinta atas segala pengorbanannya disertai do'a yang tulus dan tiada henti untuk segala urusanku dan keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.

Adik yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungannya yang tiada henti selama ini.

Seluruh keluarga besarku, sahabat dan teman-teman yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gajah Liar di Taman Nasional Way Kambas”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan Bapak.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila serta seluruh dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama masa belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

3. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih ilmu, saran, semangat dan motivasi guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang bapak berikan. Semoga kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Ibu Lilih Muflihah, S.IP, M.IP. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta motivasi dan semangat untuk menghasilkan skripsi yang baik dan benar sehingga atas kebaikan ibu, penulis mampu menyelesaikan skripsi dan studi tepat pada waktunya. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ismaji dan Supriatin atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir yang tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda.

7. Adik kandung penulis, Gita Agiska Yustisianawati. Terima kasih atas segala doa dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.
8. Seluruh informan penulis, terimakasih atas informasi serta waktunya.
9. Teruntuk Marina Ulva, terima kasih telah menjadi penyemangat bagi penulis dan selalu ada selama masa kuliah dari awal sampai selesai menyusun skripsi. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu selama ini.
10. Sekelompok calon pengusaha muda yang ada dalam group Bismillah, S.IP, M. Wiryawan, S.IP., Komang Evan Riana, Dhian Kurniawan, S.IP, Yoga Pratama, Aldin Muharom dan Muhammad Iqbal. Terima kasih atas segala kenangan, kebersamaan kita di Kosan Buk Kis, dan jangan lupakan Pakde Sopongiro, yang telah mengisi perut kita hampir selama 4 tahun terakhir. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dimanapun kalian berada.
11. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2014, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua menjadi sarjana yang bermanfaat bagi semua orang, terima kasih atas segala kenangan dan kasih sayang selama 4 tahun lebih kebersamaan, sukses untuk kita semua.
12. Teman-teman KKN Wonosari, Oki Bagus, Yoga Barlie, Vermitia, Syifa Gunawan, Yecti Jayanti, dan Cindy terimakasih sudah membuatku merasakan menjadi seorang pemimpin selama 40 hari yang memberikan banyak pengalaman dan semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Teman-teman anggota Karang Taruna Mekar Jaya Dusun Sidorejo Desa Branti Raya, terima kasih atas dukungan yang telah teman-teman berikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. jangan pernah BUBAR BARISAN.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Januari 2019

Bayu Yustisianto Ekapaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	13
1. Pengertian Kebijakan Publik	13
2. Jenis-jenis Kebijakan	14
3. Tahap-tahap kebijakan publik	15
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	19
1. Implementasi Kebijakan Publik	19
2. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	21
C. Konflik Manusia-gajah Sumatra	32
1. Definisi konflik manusia-gajah	32
2. Mitigasi konflik manusia-gajah.....	33
3. Karakteristik konflik	34
4. Prosedur tetap penanganan konflik satwa liar-manusia	36
D. Tinjauan Tentang Satwa Liar	42
1. Pengertian Satwa Liar	42
2. Perilaku Satwa Liar	42
3. Klasifikasi Gajah Sumatra	43
4. Masalah Gajah Sumatra.....	44
E. Kerangka Pikir Penelitian	45

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	48
B. Fokus Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian	51
D. Jenis Data Penelitian	51
1. Data Primer.....	52
2. Data Sekunder.....	52
E. Penentuan Informan	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Wawancara (<i>interview</i>).....	55
2. Dokumentasi.....	56
3. Observasi	57
G. Teknik Pengolahan Data	57
1. Editing	58
2. Penyusunan Data	58
H. Teknik Analisis Data	58
I. Teknik Validasi Data	60

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Taman Nasional Way Kambas	63
B. Topografi	65
C. Iklim, Suhu dan kelembapan.....	66
D. Desa Penyangga.....	68
E. Sosial dan Ekonomi	69
F. Mitra Kerja	71

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	73
1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan.....	74
2. Sumber-sumber kebijakan	83
3. Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana	94
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan	97
5. Disposisi (kecenderungan) Pelaksana	103
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	109
B. Pembahasan Implementasi SOP penanggulangan gajah liar.....	122
1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan.....	122
2. Sumber-sumber kebijakan	124
3. Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana	127
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan	128
5. Disposisi (kecenderungan) Pelaksana	131

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	133
7. Implementasi SOP penanggulangan gajah liar	134
8. Kendala-kendala dalam implementasi SOP	151

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	155
B. Saran	157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Desa pinggir hutan TNWK yang mengalami konflik	8
2. Penelitian terdahulu.....	9
3. Tabel Informan.....	54
4. Tabel daftar dokumen perolehan dari penelitian.....	56
5. Triangulasi data.....	112
6. Tabel tindakan dalam upaya penanganan konflik gajah yang terjadi	145
7. Tabel Jenis tanaman yang rusak akibat konflik gajah pada periode 2017	147
8. Tabel informasi konflik gajah tahun 2016-2018.....	148

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai satwa liar. Jenis satwa yang sampai saat ini keberadaannya masih dapat ditemukan di TNWK antara lain yang dikenal dengan *The Big Five Mammals* yaitu gajah sumatra (*Elephas Maximus Sumatranus*), badak sumatra (*Dicerorhinus Sumatranus*), harimau sumatra (*Panthera Tigris*), beruang madu (*Helarctos Malayanus*) dan tapir (*Tapirus Indicus*) (Dokumen Balai Taman Nasional Way Kambas, 2012).

Taman Nasional Way Kambas lebih dikenal sebagai habitat bagi hampir 200 gajah sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*) atau 10% dari total populasi yang diperkirakan tidak lebih dari 2000 ekor. Gajah sumatera merupakan sub 3 spesies gajah Asia yang endemik Sumatera dan spesies ini terdaftar dalam buku merah (*red data book*) Lembaga Internasional Pelestarian Alam *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dengan status terancam punah (*Endangered Species*). Sementara itu, Perjanjian Internasional tentang Perdagangan Spesies Flora dan Fauna Terancam Punah (CITES) mengategorikan gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*)

ke dalam kelompok spesies yang sangat dilarang untuk diperdagangkan sejak tahun 1990. (Prama M. Dedy dalam jurnal “*Mitigasi Konflik Manusia dan Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus Temminck, 1847) Menggunakan Gajah Patroli di Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*” 2012).

Meskipun Taman Nasional Way Kambas dikenal sebagai tempat konservasi dan pelatihan gajah, namun tidak semua gajah sudah dalam kondisi jinak, hal tersebut diperkuat dengan fakta yang Penulis temukan yaitu sebagai berikut :

“*Wildlife Conservation Societies Indonesia Program (WCSIP)* menyebut populasi gajah liar di hutan Taman Nasional Way Kambas Lampung, saat ini hanya tersisa 247 ekor dan berdasarkan hasil survei WCSI pada 2002 jumlah gajah liar di hutan TNWK sebanyak 220 ekor. Jumlah itu meningkat lebih banyak pada tahun berikutnya dan hasil survei pada tahun 2010 disebutkan jumlah populasinya berjumlah 247 ekor” (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/29/o3aatr282-gajah-di-way-kambas-hanya-tersisa-247-ekor> diakses pada Senin 29 Februari 2016 pukul 08:04 WIB).

Data di atas menunjukkan bahwa masih adanya gajah liar di Taman Nasional Way Kambas yang jumlahnya cukup banyak, tentunya hal ini harus lebih diperhatikan karena gajah liar yang ada di Taman Nasional Way Kambas sejak beberapa tahun yang lalu telah membuat resah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dan membuat banyak konflik yang melibatkan gajah liar tersebut dengan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas. Konflik mulai terjadi sejak Way Kambas disahkan menjadi kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Belanda tanggal 26 januari 1937 Stbl 1937 Nomor 38 terutama pada periode 1968–1974, kawasan ini mengalami kerusakan habitat cukup berat, yaitu ketika kawasan ini dibuka untuk hak

pengusahaan hutan, kawasan ini beserta segala isinya termasuk satwa, banyak mengalami kerusakan dan daerah sekitarnya dibuka menjadi pemukiman dan lahan pertanian bagi transmigran.

Masyarakat dan gajah sumatera sering memasuki kawasan di luar wilayah teritorinya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Taman Nasional Way Kambas juga menjadi semakin padat sejak gajah-gajah dari Lampung Selatan dan Gunung Madu di “translokasi” ke Way Kambas pada tahun 1980. Populasi yang semakin padat tentunya mengakibatkan semakin sempitnya daerah jelajahnya untuk mencari makan. Selain penyempitan habitat dan tumpang tindih pemanfaatan lahan, ada faktor lain yang dianggap menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya gangguan gajah di lokasi penelitian, yakni adanya kesukaan gajah terhadap tanaman yang dikelola masyarakat (Nuryasin, Defri Yoza, Kausar dalam jurnal “*Dinamika dan Resolusi Konflik Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus) terhadap Manusia di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*”2014).

Keterangan di atas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gajah liar yang ada di Taman Nasional Way Kambas kabur dan memasuki lahan perkebunan dan pemukiman warga sehingga menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian bagi penduduk. Gajah sumatera merupakan satwa liar yang suka mengembara, gajah jarang sekali menetap disuatu tempat yang terbatas. (Yogasara, F A., Zulkarnaini, Saam Z dalam jurnal “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Konflik Antar Gajah Dengan Manusia di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu*” 2012).

Berdasarkan berita yang diperoleh sebagai berikut :

“Sekelompok Gajah liar asal hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merangsek tanaman jagung milik petani Desa Tegalyoso, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, puluhan binatang tambun itu keluar dari dalam hutan, Sabtu (13/1/2018) dini hari. Petani Tegalyoso setiap malamnya selalu berjaga di sawah untuk menghalau gajah liar jika masuk, dengan mendirikan berbagai gubuk pampang untuk mempermudah pengintaian. “Setiap malam kami berjaga di sawah, tapi kebetulan tadi malam tidak ada yang berjaga,” kata Leman, petani Desa Tegalyoso, Sabtu (13/1/2018). Menurut Leman, tanaman jagung miliknya seluas satu hektare sebagian rusak oleh kawanan hewan berbelalai panjang itu. Selain rusak akibat dimakan gajah tanaman juga rusak akibat diinjak-injak hewan liar itu. “Banyak tanaman jagung milik petani lain juga rusak dimakan dan diinjak gajah liar itu,” kata dia. Leman beserta petani lain sudah bosan mengadu persoalan klasik tersebut, yakni persoalan konflik gajah dan petani kepada pihak terkait. Pengaduan petani sudah sering disampaikan ke Pemkab, DPRD, dan Balai TNWK, tapi tidak ada tanggapan positif. “Harapan kami hanya bagaimana pemerintah bisa mengendalikan gajah tidak lagi keluar hutan dan merusak tanaman petani,” kata Leman” (<https://lampungpro.com/post/9685/kawanan-gajah-liar-rusak-tanaman-jagung-petani-desa-tegalyoso> pada 13 Januari 2018 pukul 12.01).

Berdasarkan berita di atas menyatakan bahwa konflik gajah liar dengan manusia di Taman Nasional Way Kambas masih terus terjadi hingga saat ini dan tentunya menimbulkan dampak yang sangat besar dan merugikan masyarakat desa sekitar TNWK. Dampak yang ditimbulkan oleh gajah liar di Taman Nasional Way Kambas berdasarkan data yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

“*Wildlife Conservation Societies Indonesia Program* (WCSIP) mengatakan sedikitnya 15 orang dilaporkan meninggal dan sembilan orang terluka di 11 desa dekat TNWK antara tahun 1984 dan 1996. Responden juga menggambarkan lima kasus kematian gajah di dekat Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung. Satu dari kejadian tersebut dengan memasukkan gajah ke dalam lubang kemudian warga desa membakarnya dan empat kasus lainnya dengan diracun. Konflik manusia-gajah (KMG) menyebabkan 337 insiden kerusakan tanaman antara juni 2000-September 2002. Dalam kurun waktu 2011-2015 terdapat total 18 ekor gajah menjadi korban, dengan 16 ekor di

antaranya mati akibat perburuan liar, dan 2 ekor lainnya mati akibat konflik manusia-gajah di TNWK. Terdapat pula dua korban manusia akibat konflik manusia-gajah yang terjadi sejak tahun 2000 hingga saat ini. Selain korban jiwa, perebutan ruang antara manusia dan gajah juga berdampak pada lahan perkebunan warga, seperti lahan jagung, padi, dan singkong yang mengalami kerusakan. Pada Januari-Juli 2016 ini saja, WCSIP mencatat terdapat 153 konflik manusia-gajah pada 7.31 hektare lahan yang tersebar di 17 desa, sedangkan data 2013-2015 menunjukkan total 50,71 hektar areal perkebunan warga dirusak oleh gajah liar yang ada di TNWK Lampung Timur. (<https://lampung.antarane.ws.com/berita/293646/mengatasi-konflik-gajah-dan-manusia-di-tnwk> pada 15 Desember 2016 pukul 22.15).

Data di atas menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh konflik gajah liar dengan manusia di Taman Nasional Way Kambas sangatlah merugikan. Hal tersebut dikarenakan konflik tersebut mengancam keselamatan baik dari manusia maupun dari gajah itu sendiri. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48 /Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar bahwa:

- a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, telah ditetapkan satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara;

- b. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan sering terjadi konflik antar manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar.

Penyusunan pedoman penanggulangan konflik satwa liar dengan manusia tersebut bermaksud untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan konflik satwa liar dengan manusia. Selain itu, pedoman tersebut memiliki tujuan agar semua kegiatan penanggulangan konflik satwa liar dengan manusia dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini merupakan pelaksana dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48 / Menhut-II / 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar, yang mana Balai Taman Nasional Way Kambas (BTNWK) menjadi pelaksana teknis. Upaya dalam menanggulangi konflik antara manusia dan satwa liar gajah diperlukan usaha penanggulangan yang efektif di bawah koordinasi Balai Taman Nasioanl Way Kambas, dan pola penanganan konflik manusia dan gajah harus dilakukan pada saat yang tepat secara konseptual, terkoordinasi, dan terpadu. Adapun pelaksanaan penanggulangan konflik

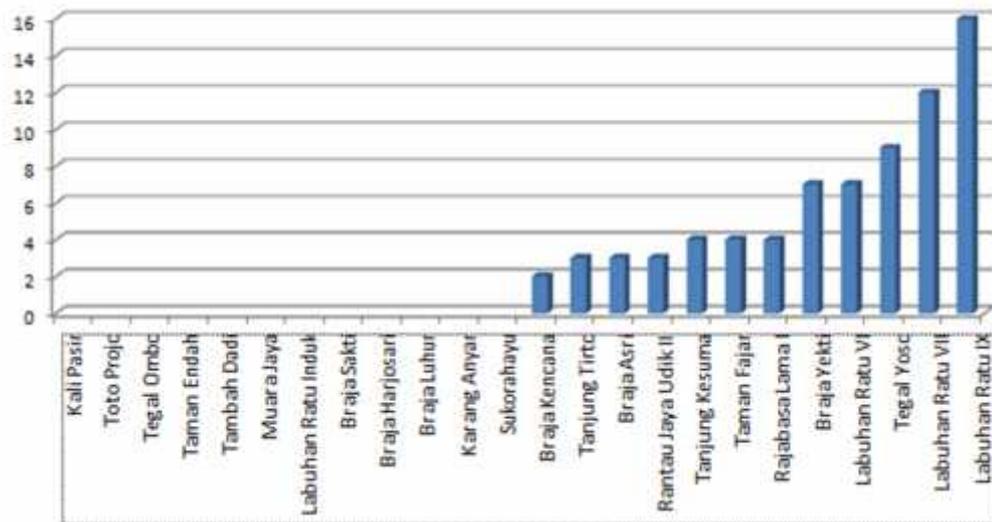
manusia dan gajah liar harus dilaksanakan sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedures*) Balai Taman Nasional Way Kambas melalui 3 (tiga) tahap utama, yaitu:

- 1) Tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi;
- 2) Tahap selama gangguan gajah liar terjadi;
- 3) Tahap setelah gangguan gajah liar terjadi.

Terdapat beberapa kegiatan dalam setiap tahapan-tahapan tersebut baik sebelum gangguan, selama gangguan dan setelah gangguan gajah liar yang harus dilakukan dalam penanggulangan konflik gajah liar dengan manusia. Setelah adanya kebijakan tersebut, proses implementasi kebijakan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dan menjadi proses yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat dalam penanggulangan konflik antara manusia dengan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.

Penerapan SOP tersebut dilakukan oleh masyarakat desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas dan terlibat konflik dengan gajah liar yang dibantu oleh Masyarakat Mitra Polhut (MMP), *Wildlife Conservation Societies Indonesia Program* (WCSIP) dan *Elephant Respon Unit* (ERU). Namun faktanya sampai saat ini konflik gajah liar dengan manusia di Taman Nasional Way Kambas masih terjadi. Berdasarkan data yang Penulis dapatkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Desa pinggir hutan TNWK yang mengalami konflik gajah periode 2017



Sumber : Laporan Tahunan KMG, 2017

Data di atas menunjukkan bahwa konflik gajah liar dengan manusia pada tahun 2017 masih terjadi dengan frekuensi yang berbeda-beda di setiap desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas. Selain itu, data di atas menunjukkan frekuensi konflik yang terjadi di desa-desa sekitar Taman Nasional Way Kambas yang berjumlah 12 desa. Desa yang frekuensi konfliknya tertinggi pada tahun 2017 adalah Desa Labuhan Ratu IX. Berdasarkan permasalahan tersebut Penulis telah meneliti bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas dan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan konflik manusia dengan gajah liar akan Penulis sajikan dan penyajian penelitian terdahulu bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Zazuli	Mitigasi konflik manusia-gajah oleh <i>elephant response unit</i> di resort toto projo Taman Nasional Way Kambas	Hasil dari penelitian menunjukkan sumberdaya ERU telah memenuhi I syarat minimal SOP, kecuali pada jumlah gajah yaitu empat ekor dan semuanya jantan. Upaya mitigasi berguna untuk mengetahui informasi terbaru tentang keberadaan gajah. KMG sebanyak 43 kasusterdiri dari 37 kasus terjadi di Desa Tegal Yoso dan enam kasus di Desa Tanjung Tirto. Kasus KMG 98% gajah datang berkelompok dan 2% gajah datang soliter. Tigajenis tanaman yang sering dirusak adalah singkong (<i>Manihot utilissima</i>)40 kasus, jagung (<i>Zea mays</i>)27 kasus dan padi (<i>Oryza sativa</i>)13 kasus serta 98% gajah datangpada pukul 18.00-00.00 WIB. Pencapaian ERU dalam mengendalikan KMG dinilai 100% positif oleh pengguna program sesuai dengan tujuan pembentukannya. Masyarakat desa penyangga memberikan penilaian positif sebesar 93% dan 7%menilai negatif terhadap ERU.
2	Yob Charles	Analisis konflik gajah manusia sebagai landasan strategi pengelolaan mitigasi di Resort Pemerihan	Konflik gajah manusia dipengaruhi oleh: a) keberadaan lahan pertanian (meningkat 7,37 kali untuk setiap penambahan lahan pertanian 0,52 ha (P value =0,000)), b) semak belukar (menurun menjadi 0,42kali pada (P value=0,232), dan dalam tingkat lereng agak curam (3-8%) konflik gajah akan berkurang sebanyak 0,20 apabila persentase lereng meningkat, c) jarak dari sungai sangat berpengaruhdimana setiap kali jarak bertambah 1 meter dari sungai maka konflik gajah akan meningkat 1,41kali dari semula

			dimana (P value =0,006), d) curah hujan sangat berpengaruh dan nyata (menurun 0,78 kali setiap curah hujan meningkat 1 mm) dengan nilai (P = 0,003), e) waktu pergerakan jam 9,53 pagi (menurun 0,08 kali setiap penambahan waktu dari jam 09.00 pagi sampai jam 17.00 wib sore) dengan (P=0,000).
3	Nuryasin, Defri Yoza, Kausar	Dinamika dan Resolusi Konflik Gajah Sumatra (<i>Elephas Maximus Sumatranus</i>) terhadap Manusia di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	<p>1. Tipologi Konflik Gajah-Manusia yang ada di lokasi penelitian antara lain:gajah merusak tanaman, gajah merusak pondok dan rumah masyarakat, gajah menyerang/ melukai masyarakat dan masyarakat melukai / membunuh gajah.</p> <p>2. Upaya penanggulangan konflik yang dilakukan masyarakat selama ini belum berhasil menanggulangi gangguan gajah terutama untuk jangka panjang. Upaya penanggulangan gangguan gajah yang banyak dilakukan masyarakat selama ini hanya bersifat sementara, yakni dengan cara-cara pengusiran dan pembuatan halangan fisik. Kawanan gajah masih saja mendatangi perkebunan masyarakat meski berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan.</p> <p>3. Nilai kerugian ekonomi di Desa Petanidan Desa Balai Makam akibat Konflik Gajah-Manusia terdiri dari kerugian tidak langsung dan kerugian langsung. Kerugian tidak langsung merupakan nilai kerugian ekonomi dalam jangka panjang yang diakibatkan oleh adanya Konflik Gajah - Manusia. Nilai kerugian ekonomi langsung merupakan nilai kerugian yang dapat langsung dihitung berdasarkan kerusakan yang terjadi. Kerugian langsung ditaksir mencapai Rp.120.014.200,-. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian tanaman /vegetasi sebesar Rp.106.714.200,- dan kerugian pondok serta rumah masyarakat sebesarRp.13.300.000,-.</p>

Sumber : diolah Penulis, 2018

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dari segi teori yang digunakan, selain itu penelitian ini lebih memfokuskan pada tahap implementasi kebijakan untuk melihat implementasi kebijakan yang ada terkait penanggulangan konflik gajah liar dengan manusia di Taman Nasional Way Kambas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas
2. Kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas
2. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teori yang ada pada mata kuliah kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah serta masyarakat dalam menanggulangi gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan (Hamdi, 2014:36). Sedangkan pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya (Abidin, 2012:8).

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai : “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu untuk diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2016:17).

Kebijakan publik dipahami sebagai akibat dari apa yang ditimbulkan oleh masyarakat, sehingga kebijakan publik itu merupakan kumpulan dari gagasan masyarakat yang memberikan bentuk ruang publik yang sangat erat hubungannya dengan aktor masyarakat yang mempengaruhi dan menginformasikannya (Dinham, 2009:50).

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat. (sulistio, 2012:3), sedangkan menurut Kaplan kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (Nugroho, 2011:93).

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan publik untuk mewujudkan kepentingan seluruh masyarakat.

2. Jenis-jenis Kebijakan

Subarsono (2016:19) menyatakan bahwa secara tradisional, pakar ilmu politik mengategorikan kebijakan publik ke dalam kategori : 1. Kebijakan substantif (misalnya : kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya); dan 2. Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen); 3.

Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru, dan kebijakan masa orde lama).

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Proses tersebut terdiri dari kegiatan penyusunan agenda kebijakan, adopsi kebijakan implementasi dan evaluasi atau penilaian sebuah kegiatan kebijakan publik (Madani, 2011:21). Tahap-tahapan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Kebijakan publik merupakan produk pemerintah untuk mengatasi segala problema yang terjadi dikehidupan masyarakat, oleh karenanya dalam membuat suatu kebijakan pemerintah tidak sembarangan mengeluarkan atau menetapkan kebijakan, dalam pemaknaannya kebijakan harus direncanakan agar sebuah kebijakan tersebut tidak merugikan. Dalam bahasa kebijakan tahap proses penetapan biasa disebut dengan agenda setting.

“Agenda setting adalah proses dimana persaingan kelompok elit untuk mengatur agenda sebuah masalah dan untuk mencari solusi alternatif. Perselisihan antar elit dapat terjadi jika tidak adanya masyarakat atau lembaga politik yang memiliki kapasitas untuk mengatasi semua agenda tersebut yang dapat menimbulkan masalah” (Fischer, 2007:63).

Kelompok yang dipilih dan diangkat nantinya akan menempatkan masalah pada isu agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah obyek eksplisit penyelidikan dalam studi desain kebijakan dan perangkat kebijakan, namun juga memperhatikan formulasi kebijakan yang tertanam dalam pekerjaan subsistem, koalisi advokasi, jaringan dan kebijakan masyarakat (Fischer, 2007:80). Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada.

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan kebijakan (*policy legitimation*) merupakan mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan (*enactment*) kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan (Hamdi, 2014:94). Oleh karena itu sering kali terlihat setiap ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti pemerintah tidak serta merta menetapkan dan mengesahkan kebijakan secara individu melainkan butuh dukungan politik dan dukungan legitimasi dari setiap elemen seperti akademisi, civil society dan elit politik.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah yang memang memiliki kewenangan dalam melaksanakannya. Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (Suharno, 2013:138). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran dan bahkan kepentingan memaksa pemerintah menggunakan wewenang dikresi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak.

Oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun lembaga-lembaga pemerintah di tingkat bawah.

e. Tahap Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah, kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Berbagai langkah yang dipaparkan di atas mengingatkan pada fungsi manajemen, yang intinya mencakup tiga hal: *planning, organizing dan controlling* (Wibawa, 2011:8).

Paparan tentang tahap-tahap kebijakan di atas telah menjelaskan bahwa tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan (masalah) publik yang layak untuk dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu tahap formulasi kebijakan. Setelah diformulasikan, pada tahap tahap adopsi kebijakan akan dipilih

alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik.

Selanjutnya, kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan. Penulis menyimpulkan bahwa tahap pelaksanaan kebijakan publik meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap penilaian kebijakan. Pada penelitian ini memfokuskan pada tahap penilaian kebijakan yaitu lebih mengarah pada penilaian implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.

B. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Agustino (2014:195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Agustino (2014:198) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (*action*) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Begitu juga yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.

2. Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijakan yang semakin kompleks, untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Sebenarnya banyak model-model yang diajukan oleh para ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model yang cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran dan tulisan para ahli. Model-model tersebut antara lain:

a. Model Implementasi menurut Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn

Model ini kerap kali oleh para ahli disebut sebagai *the top down approach*. Pada model ini menjabarkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna. Maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Wahab (1997:96) mengklasifikasikan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius;
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausalitas yang handal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung, hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier

Model ini disebut juga dengan *A Frame Work for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Wahab (1997:81) mengklasifikasikan variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap atau dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya;
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

c. Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

Model ini sering disebut sebagai *A Model of the policy Implementation process* (Model Implementasi Kebijakan). Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*Performance*). Kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan (Wahab,2004:73). Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah terealisasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, di samping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah

dalam beberapa kasus. Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan

2. Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kebijakan, kita sering kali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana.

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Winarno, 2016:147). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki

terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Subarsono mengungkapkan kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7). Komponen dari model ini terdiri dari stuktur-struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan.

4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut. Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan.

Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja, apa pengaruh ini terhadap variabel dependen ditengahi oleh variabel independen lain. Jelas yang memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan

komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana standars dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik dari dari pihak atasan kepada pelaksana kebijakan yang dilakukan dengan baik akan menyebabkan implementasi kebijakan akan berjalan lebih baik.

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

6. Disposisi (sikap para pelaksana)

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan bergantung pada pengaruh kebijakan itu bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasinya.

Kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

d. Model Implementasi menurut George C Edward III

George C Edwards III mengungkapkan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), sikap (*Dispositions atau Attitudes*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) (Subarsono, 2005:55).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreak down (diturunkan)

melalui eksplanasi implementasi ke dalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Variabel-variabel kebijakan berkaitan dengan tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan

Berdasarkan beberapa model implementasi di atas, Penulis menggunakan Model Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana, Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Disposisi, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya dan disposisi. Penggabungan kedua model implementasi kebijakan tersebut bertujuan untuk menambah pemahaman dan mempertegas asumsi terkait dengan implementasi kebijakan, sehingga penulis lebih mudah dalam menyajikan dan menjelaskan terkait

dengan implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.

C. Konflik Manusia-Gajah Sumatera (*Elephant Maximus Sumatranus*)

1. Definisi Konflik Manusia-Gajah

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/ 2008, konflik manusia-satwa liar yang di dalamnya termasuk gajah adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan dan pada konservasi gajah dan atau pada lingkungannya

Konflik manusia-gajah berdampak langsung bagi manusia yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya tanaman budidaya, perampasan hasil tanaman, rusaknya infrastruktur dan sumber air, gangguan dan matinya hewan ternak, dan korban luka dan meninggal bagi manusia. Terluka dan matinya gajah oleh manusia akibat dari konflik manusia- gajah merupakan dampak langsung pada gajah. Peningkatan populasi manusia secara langsung atau tidak langsung menyebabkan konflik manusia-gajah disuatu wilayah. Beberapa ancaman utama seperti fragmentasi habitat, perambahan, perburuan, korban manusia.

2. Mitigasi Konflik Manusia-Gajah

Teknik melakukan mitigasi dibagi menjadi dua bagian yaitu teknik mitigasi tradisional dan modern. Teknik mitigasi tradisional adalah teknik mitigasi hasil karya lokal yang diwariskan turun temurun misalnya dalam penggunaan api unggun atau obor dalam mengusir gajah. Teknik ini telah lama diperkenalkan masyarakat Sumatera dan Jawa (waktu masih terdapat populasi gajah) dalam mengusir satwa terutama gajah waktu itu.

Teknik lain adalah dengan menggunakan kentongan atau bunyi-bunyian. Teknik modern seringkali mengikuti cara-cara tradisional misalnya dalam pengembangan meriam karbit untuk mengusir gajah, atau yang lebih modern lagi menggunakan pengeras suara dengan bunyi dentuman atau hentakan yang fungsinya untuk pengusiran gajah. Penggunaan api sampai saat ini masih dilakukan terutama dari masyarakat lokal sebagai bentuk kearifan tradisional, tetapi di beberapa tempat, lampu sorot menjadi bagian dari mitigasi menggantikan api unggun atau obor.

Teknik lain adalah pengembangan parit gajah, *electric fencing* (pagar listrik tegangan rendah) dan penggunaan gajah dalam pengusiran dan penggiringan gajah liar. Kanal atau parit gajah adalah salah satu upaya mitigasi konflik antara gajah dengan manusia dimana teknik ini telah lama diperkenalkan orang terutama di wilayah Sumatera sejak tahun 1980an (Sukmara M. Pratama Dedy dan Dewi Bainah Sari dalam jurnal “*Mitigasi Konflik Manusia dan Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus*

Temminck, 1847) Menggunakan Gajah Patroli di Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”2012).

3. Karakteristik konflik

Identifikasi konflik oleh SATGAS dilakukan untuk menilai karakteristik konflik disuatu wilayah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyelesaian konflik antara manusia dan gajah lebih lanjut secara komprehensif (Departemen kehutanan, 2008).

Penilaian karakteristik konflik meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Kondisi konflik

- 1) Frekuensi/ intensitas konflik yang terjadi
- 2) Besaran kerusakan yang ditimbulkan
- 3) Upaya yang sudah dilakukan dalam penanganan konflik

b. Penilaian populasi gajah yang terlibat konflik

- 1) Identifikasi individu gajah (gajah soliter atau gajah kelompok)
- 2) Estimasi jumlah kelompok dan individu perkelompok
- 3) Informasi struktur populasi dan *sex ratio*

c. Penilaian habitat

- 1) Kondisi habitat gajah di sekitar lokasi konflik
- 2) Status lahan di areal konflik dan sekitarnya
- 3) Luasan hutan kompak yang belum dikonversi
- 4) Ketersambungan dengan habitat lain dan keberadaan koridor
- 5) Prediksi jalur jelajah dan jalur keluar-masuk populasi gajah dari habitat kekawasan budidaya.

- 6) Keberadaan dan formasi penghalang alami yang efektif antara habitat dan kawasan budidaya. Formasi penghalang alami ini meliputi tebing sungai, jurang, topografi terjal, rawa dalam, laut, danau, bebatuan karang, dan lainnya.

Tingkat resiko konflik dibedakan atas pertimbangan ancaman terhadap keselamatan manusia, dan respon yang harus dilakukan, yaitu:

- a) Resiko rendah adalah kejadian konflik yang tidak mempunyai potensi terhadap keselamatan manusia maupun gajah, namun dapat menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan. Tindakan langsung di lapangan tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.
- b) Resiko sedang adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi mengancam keselamatan manusia dan gajah apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan. Pada tahap ini perlu dilakukan
- c) Resiko tinggi adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi sangat mengancam keselamatan manusia apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan. Mengingat potensi dan resikonya, SATGAS segera menurunkan tim penanggulangan konflik ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

4. Prosedur tetap penanganan konflik satwa liar–manusia

Konflik antara manusia dan satwa liar gajah adalah salah satu bagian dari konflik antara manusia dan satwa liar yang secara luas dapat didefinisikan sebagai segala interaksi antara manusia dan gajah yang mengakibatkan pengaruh negatif pada kondisisosial, ekonomi atau budaya manusia, serta kondisi sosial, ekologi atau satwa liar gajah dan lingkungannya (*diadaptasi dari IUCN/SSC African Elephant Specialist Group*).

Peristiwa gangguan gajah liar yang terjadi secara berulang di desa-desa sekitar hutan Taman Nasional Way Kambas telah memberikan dampak terhadap tata-kehidupan masyarakat selain kerugian harta benda dan jiwa, secara keseluruhan secara individu adalah resiko trauma mental akibat dari terganggunya usaha ekonomi (komoditas pertanian dan perkebunan).

Upaya menanggulangi konflik satwa-manusia ini juga berlaku pepatah kata mencegah lebih baik daripada mengobati, oleh karena itu Konflik antara manusia dan satwa liar gajah diperlukan usaha penanggulangan yang efektif di bawah koordinasi Balai Taman Nasioanl Way Kambas, dan pola penanganan konflik manusia dan gajah harus dilakukan pada saat yang tepat secara konseptual, terkoordinasi, dan terpadu.

Adapun pelaksanaan penanggulangan konflik manusia dan gajah harus melewati 3 (tiga) tahap utama, yaitu : 1) Tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi, 2) Tahap selama gangguan gajah liar terjadi, 3) Tahap setelah gangguan gajah liar terjadi. Pada semua tahap mitigasi konflik satwa liar di

Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur sudah menggunakan instrument pemantauan pergerakan gajah liar terpadu yakni monitoring satwa liar melalui ERU (*elephant respond unit*) atau GPU (gajah patrol unit) yang dipadu-serasikan melalui sistem komunikasi berjenjang di kelompok masyarakat desa menggunakan perangkat HT (*handy talky*).

1. Saat sebelum gangguan gajah liar terjadi

Konflik/ gangguan satwa liar tidak sepenuhnya dapat dihindari, namun masyarakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan satwa liar, dan mengurangi dampaknya dengan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya ada beberapa kegiatan pokok yang bisa dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor oleh UPT/Dinas/Lembaga teknis, meliputi :

- a. Membuat peta daerah rawan bencana/konflik gajah manusia dilaksanakan secara partisipatif oleh UPT/Dinas/Lembaga teknis yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat, kemudian menginformasikan kepada pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan
- b. Menyusun potensi satuan kelompok dimasyarakat dalam penanggulangan konflik gajah liar dilakukan oleh penyuluh UPT setempat dengan melibatkan lembaga pemerintahan desa yang wilayahnya masuk dalam sebaran daerah rawan konflik.

- c. Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan dengan melakukan kegiatan pelatihan dan gladi pencegahan dan mitigasi konflik satwa liar oleh UPT/Dinas/Lembaga teknis.
- d. Monitoring pergerakan satwa liar sebagai peringatan dini dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Way Kambas atau satuan unit yang ditunjuk dengan melibatkan PKG (pusat konservasi gajah), dan menyampaikan informasi kepada satuan resort dan orang yang ditunjuk sebagai koordinator setiap desa daerah rawan konflik gajah
- e. Mengidentifikasi lintasan aktif gajah dan memasang deteksi dini seperti pagar sirine, pagar kaleng/deteksi dini lain yang dapat menghambat pergerakan gajah liar untuk keluar dari kawasan hutan serta menetapkan sebagai daerah alternatif pemblokiran dan penggiringan satwa liar gajah
- f. Menyusun penanggulangan konflik gajah manusia berbasis partisipasi sesuai prosedur rencana kerja, serta membuat dan menetapkan rencana anggaran/biaya kegiatan penanganan konflik gajah manusia
- g. Melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah-wilayah lain yang mengalami konflik satwa liar untuk merencanakan kegiatan penanganan KGM yang berguna bagi masyarakat di daerah lain.

2. Ketika gangguan gajah liar terjadi

Penanganan ketika gangguan satwa liar terjadi adalah semua tindakan yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan tanaman atau harta benda, dan jiwa masyarakat serta melindungi satwa dari upaya untuk menyakitinya ketika konflik/gangguan satwa liar terjadi. Dalam tindakan darurat, waktu adalah faktor yang sangat penting karena waktu dapat menentukan berapa tanam-tumbuh yang rusak atau harta benda masyarakat yang dapat diselamatkan.

Perencanaan yang hati-hati sebelum konflik/gangguan satwa liar terjadi adalah tindakan awal yang sangat penting untuk penanganan konflik/gangguan satwa liar pada waktu yang tepat dan efisien. Beberapa kegiatan yang segera dilaksanakan secara lintas sektoral ketika konflik gajah manusia terjadi adalah :

- a. Mengirimkan TRC (tim reaksi cepat) ke daerah yang mengalami gangguan satwa liar untuk bergabung bersama masyarakat desa setempat untuk bersama sama melakukan pencegahan (pemblokiran) gajah untuk tidak keluar dari dalam hutan.
- b. Upaya pencarian gajah jika sudah berada dalam areal pertanian masyarakat untuk segera dilakukan upaya penggiringan mengembalikan gajah ke dalam hutan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan gangguan satwa liar gajah.

- c. Mengkaji gangguan satwa liar gajah di lapangan dan kebutuhan yang diperlukan dalam pengurangan dampak dari konflik satwa yang ada, dan mengirimkan bantuan sarana dan prasarana/peralatan satgas KGM kedaerah konflik oleh satuan tugas yang ditunjuk oleh Balai/UPT setempat dengan melibatkan *stakholder* yang ada
- d. Melaporkan segera kejadian gangguan gajah dan upaya penanggulangannya kepada Kepala Desa, Kepala Balai, Kepala Dinas dan Bupati bila diperlukan.

3. Setelah gangguan gajah liar terjadi

Pemulihan setelah konflik satwa liar gajah terjadi merupakan tindakan untuk mendukung masyarakat kembali hidup normal dan membangun kembali lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Masa pemulihan setelah gangguan gajah liar terjadi adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan penanganan konflik satwa liar, seperti memastikan bahwa daerah tempat berusaha tani/bercocok tanam telah aman dari gajah liar sehingga masyarakat bisa kembali beraktifitas.

Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi apabila masyarakat tersebut mau berperan aktif dalam pemulihan setelah konflik satwa liar terjadi, karena hanya masyarakat itu sendirilah yang paling mengetahui apa yang mereka butuhkan dan apa yang tidak mereka butuhkan. Setiap anggota masyarakat terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga mengurangi stress, trauma, depresi, karena mereka tetap aktif dan bekerja

untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Beberapa kegiatan/tindakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi :

- a. Analisis kerusakan dan kebutuhan, kajian dampak dari terjadinya konflik satwa liar seperti menghitung jumlah kerusakan tanam-tumbuh dan pra-sarana lain yang dialami masyarakat setelah konflik satwa liar terjadi dilaksanakan secara fungsional oleh Balai Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Perkebunan Kehutanan, Dinas Pertanian dengan melibatkan *stakholder*, dan menyampaikan informasi perkiraan jumlah kerugian kepada Kepala Desa, Kepala Balai, dan Bupati serta membuat rencana tindak lanjut
- b. Melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang rusak oleh Taman Nasional Way Kambas dengan melibatkan *stakholder*, merekonstruksi sarana penunjang penanganan konflik satwa seperti gubuk/menara jaga, pagar sirine/pagar kaleng, parit kanal/tanggul dan lain sebagainya
- c. Penanganan situasi dan kondisi sosial masyarakat (trauma *haeling*) dengan mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah yang mengalami konflik satwa liar

D. Tinjauan Tentang Satwa Liar

1. Satwa Liar

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, satwa liar dapat juga diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia (Alikodra,1990 : 31).

2. Perilaku Satwa Liar

Menurut Tanudimadja (1978 : 105) perilaku satwa liar diartikan sebagai ekspresi suatu hewan yang ditimbulkan oleh semua faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku satwa ini disebut rangsangan yang berhubungan erat dengan fisiologisnya. Perilaku satwa yang terjadi antara lain:

1. *Shelter seeking* atau mencari perlindungan, yaitu mencari kondisi lingkungan yang optimum dan menghindari bahaya.
2. Perilaku agonistik, yaitu perilaku persaingan atau pertentangan antara dua satwa yang sejenis, umum terjadi selama musim kawin.
3. Perilaku investigasi, yaitu perilaku memeriksa lingkungan. Fungsi utama dari perilaku adalah untuk menyesuaikan diri terhadap beberapa perubahan keadaan, baik dari dalam maupun dari luar. Sebagian besarsatwa mempunyai pola perilaku yang dapat dicobakan untuk suatusituasi, dengan demikian mereka belajar menerapkan salah satu

pola yang menghasilkan penyesuaian terbaik. Begitu pula satwa liar Gajah sumatra yang ada di Taman Nasional Way Kambas.

3. Klasifikasi Gajah Sumatera

Gajah sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*) merupakan salah satu dari sub species gajah asia (*Elephas Maximus*). Dua sub species yang lainnya yaitu *Elephas maximus maximus*, dan *Elephas Maximusindicus* hidup di anak benua India, Asia Tenggara, dan Borneo (Hamid, 2002). Klasifikasi gajah sumatera menurut Lekagul dan McNeely (1977) adalah sebagai berikut:

- a. Kerajaan : *animalia*
- b. Filum : *chordata*
- c. Sub filum : *vertebrata*
- d. Kelas : *mammalia*
- e. Bangsa : *proboscidea*
- f. Suku : *elephantidae*
- g. Marga : *elephas*
- h. Jenis : *elphas maximus*
- i. Anak jenis : *elephas maximus sumatranus*

4. Masalah Gajah Sumatra

Menurut Primack, Supriatna dan dkk (1998:97) ancaman utama pada keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kegiatan manusia adalah perusakan habitat, fragmentasi habitat, dan gangguan pada habitat. Beberapa faktor yang mengancam populasi gajah, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pembunuhan, dan perburuan liar, fragmentasi dan kehilangan habitat gajah, kelemahan institusi, dan instabilitas politik.

Kehilangan habitat, fragmentasi habitat serta menurunnya kualitas habitat gajah karena konversi hutan atau pemanfaatan sumber daya hutan untuk keperluan pembangunan non kehutanan maupun industri kehutanan merupakan ancaman serius terhadap kehidupan gajah, dan ekosistemnya. Ancaman lain yang tidak kalah serius adalah konflik berkepanjangan dengan pembangunan, dan perburuan ilegal gading gajah (Departemen Kehutanan, 2007).

Berkurangnya habitat gajah akan mengakibatkan pengurangan ruang gerak sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup dari sisi ekologi sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara satwa tersebut dalam kegiatan pembangunan di sekitar habitatnya seperti yang terjadi di Taman Nasional Way Kambas terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia akibat adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir adalah acuan para Penulis untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar bisa memfokuskan kepada suatu masalah yang akan diteliti. Permasalahan penelitian ini adalah konflik yang ditimbulkan oleh gajah liar yang ada di Taman Nasional Way Kambas memasuki perkebunan dan pemukiman warga desa penyangga Taman Nasional Way Kambas yang telah terjadi bertahun-tahun dan sangat membahayakan bila tidak segera diatasi.

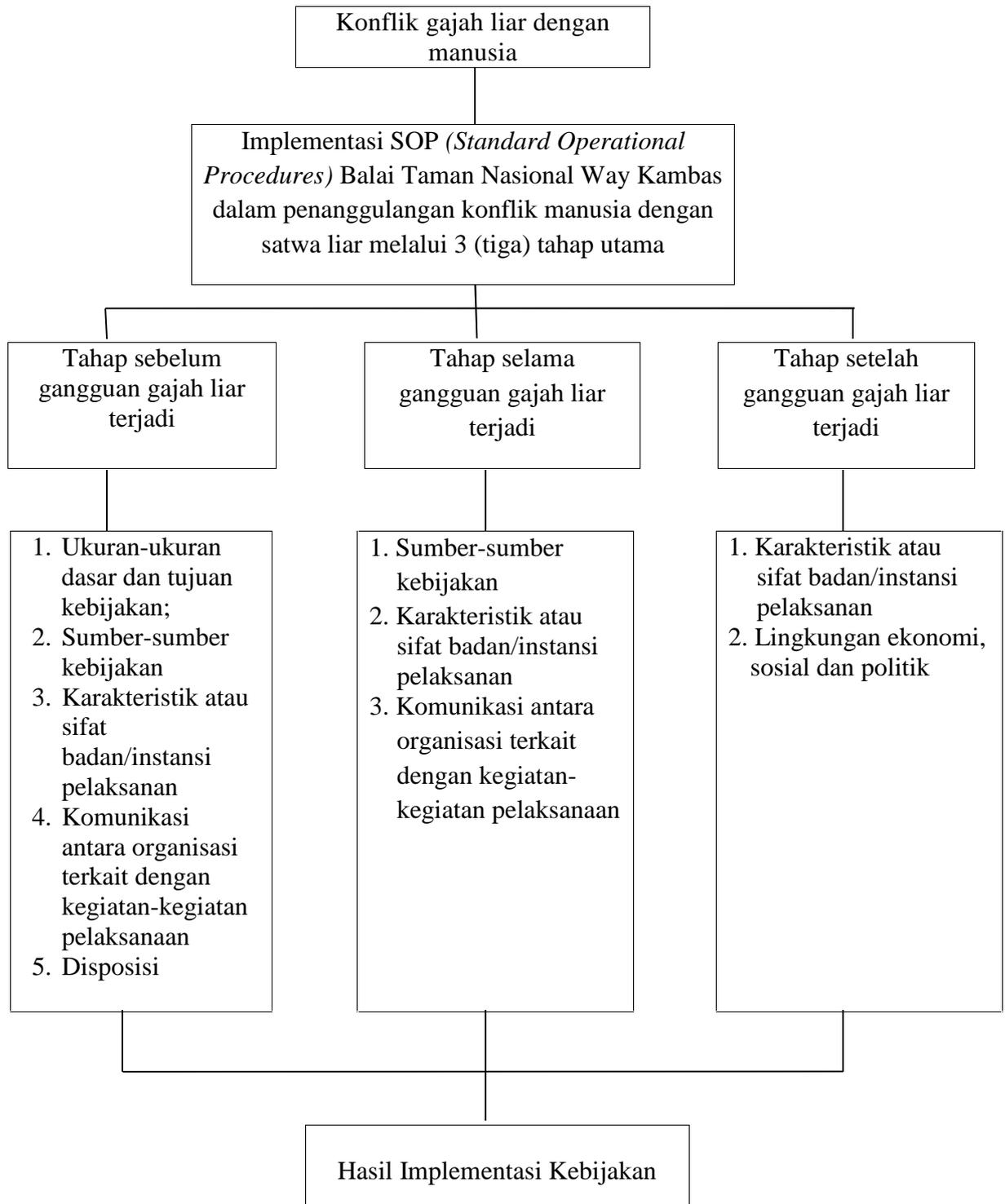
Konflik tersebut terjadi didasari karena adanya alih fungsi hutan yang tadinya merupakan wilayah jelajah gajah, namun seiring waktu berjalan hutan tersebut dijadikan lahan bercocok tanam maupun berkebun oleh warga desa penyangga Taman Nasional Way Kambas. Hal itu yang menjadi awal permasalahan konflik gajah liar dengan manusia yang hingga saat ini masih berlangsung.

Balai Taman Nasional Way Kambas dalam hal ini memegang peran sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Manusia dan pelaksanaan penanggulangan konflik manusia dan gajah liar harus dilaksanakan sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedures*) Balai Taman Nasional Way Kambas melalui 3 (tiga) tahap utama, yaitu:

- 1) Tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi,
- 2) Tahap selama gangguan gajah liar terjadi,
- 3) Tahap setelah gangguan gajah liar terjadi.

Pelaksanaannya dibantu oleh WCS-IP, ERU, Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat desa yang terlibat KMG, hingga saat ini belum berhasil menanggulangi gajah liar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas dan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas dengan menggunakan indikator model implementasi kebijakan yaitu Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana, Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Disposisi, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Penulis telah menggambarkan kerangka pikir yang akan memperjelas penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

Sumber : diolah Penulis, 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Menurut Prastowo (2016:22), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya menurut Ahmadi (2016:14), kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa tipe deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata dan bukan berupak angka-angka. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.

Tipe penelitian deskriptif kualitatif ini dipilih karena bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak menggeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penulis dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas dan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas. Untuk

itu penelitian yang telah Penulis lakukan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting keberadaannya untuk membatasi Penulis dalam melakukan penelitian, yang dimaksud membatasi Penulis adalah memberikan batas dalam pengumpulan data atau menentukan informan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Idrus (2009:24), fokus penelitian adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seseorang Penulis kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Penulis menyimpulkan bahwa fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman Penulis atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga Penulis dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik.

Selanjutnya dengan penetapan fokus yang jelas, seorang Penulis dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu digunakan ataupun mana yang akan dibuang. Mengingat pentingnya fokus penelitian untuk membuat penelitian lebih terarah dan efisien, maka Penulis merumuskan fokus penelitian implementasi

kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas ini dengan indikator-indikator model Implementasi sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
 - a. Pedoman dalam penanggulangan gajah liar
 - b. Ketepatan tujuan kebijakan penanggulangan gajah liar
2. Sumber-sumber kebijakan
 - a. Ketersediaan dana penunjang dalam penanggulangan gajah liar
 - b. Kemampuan masyarakat/badan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan gajah liar
 - c. ketersediaan fasilitas pendukung implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar
3. Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana
 - a. Tugas dan wewenang pelaksana kebijakan penanggulangan gajah liar
4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 - a. koordinasi antara badan pelaksana kebijakan (BTNWK, MMP, WCS-IP, ERU dan Masyarakat)
 - b. Kejelasan penyampaian program dan informasi tentang kebijakan penanggulangan gajah liar oleh badan pelaksana kepada masyarakat
5. Disposisi (kecenderungan) Pelaksana
 - a. ketaatan para badan pelaksana terhadap kebijakan penanggulanagan gajah liar
 - b. Sikap pelaksana kebijakan dalam penanggulangan gajah liar

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
 - a. pengaruh lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2011:128) dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur, Kantor WCS-IP, Camp ERU dan Desa Labuhan Ratu IX. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi bisa langsung didapat dari lokasi yang telah ditentukan oleh Penulis.

D. Jenis Data

Penulis harus mendapatkan data secara langsung dan akurat. Penulis harus mencari data dari sumber utama (*first hand*), dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Idrus (2009:86) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber langsung atau yang mengetahui langsung data maupun informasi yang akan Penulis cari. Penelitian ini data diperoleh dengan wawancara dengan tatap muka antara penulis dengan informan (perekaman menggunakan *handphone*).

Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini mengetahui secara baik tentang implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas. Informan yang diwawancarai Penulis yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TNWK, *Landscape Manager* WCS-IP, Anggota Tim *Elephant Respon Unit* (ERU), Koordinator MMP Desa Labuhan Ratu IX, dan Sekretaris Desa Labuhan Ratu IX.

2. Data Sekunder

Menurut Idrus (2009:86) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua atau secara tidak langsung seperti dokumentasi yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Way Kambas dan WCS-IP. Data observasi di Taman Nasional Way Kambas dan Desa-desa penyangga.

E. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat Penulis mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Cara purposive sampel artinya penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Selaras dengan hal tersebut, menurut Prastowo (2016:44) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak menggunakan *random sampling* atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan (*purpose*) penelitian.

Penulis menyimpulkan bahwa teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan yang lebih memahami permasalahan yang ada.

Menurut Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria di atas, maka informan dalam penelitian ini akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Informan Penelitian

Informan	Nama	Jabatan
Balai Taman Nasional Way Kambas	Hermawan, S.Hut	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TNWK
<i>Wildlife conservation Societies Indonesia program (WCS-IP)</i>	Giyo	<i>Landscape Manager WCS-IP Lampung Timur</i>
<i>Elephant Respon Unit (ERU)</i>	Sakipul Mustopa	Anggota Tim ERU
Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	Tohari	Koordinator MMP Desa Labuhan Ratu IX
Masyarakat desa yang terlibat KMG	Suminto	Sekretaris Desa Labuhan Ratu IX

Sumber: Diolah Penulis, 2018

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan *reliable*.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan (Sujarweni, 2014:74). Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam, wawancara dan observasi bisa dilakukan secara bersamaan, wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh dari observasi, dengan demikian tidak ada informasi yang terputus antara yang dilihat dengan yang didengar serta dicatat (Indrawan dan Yaniawati, 2014:136).

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian, juga untuk merespon berbagai pendapat untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akan datang.

Penulis mewawancarai informan yaitu Bapak Hermawan, S.Hut (KASUBAG TU Balai TNWK) pada 17 september 2018 pukul 14.00 WIB, Bapak Giyo (*Landscape Manager* WCS-IP) pada 17 september 2018 pukul 11.30 WIB, Bapak Sakipul Mustopa (Anggota Tim ERU) pada 29 oktober 2018 pukul 14.30 WIB, Bapak Tohari (Koordinator MMP Desa Labuhan Ratu IX) pada 25 september 2018 pukul 13.30 WIB, dan Bapak Suminto (Sekretaris Desa Labuhan Ratu IX) pada 25 september 2018 pukul 11.30 WIB.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Indrawan dan Yaniawati, 2014:139). Di samping dari sumber catatan resmi atau *official of formal records* ada pula sumber sekunder termasuk dokumen–dokumen ekspresif seperti biografi, auto biografi, surat–surat dan buku harian termasuk laporan media massa baik melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronis lainnya (Faisal,2005:53). Berikut ini dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan penulis akan penyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Dokumen Perolehan dari Penelitian

Balai TNWK	WCS-IP	Lain-lain
Petunjuk praktis mitigasi konflik satwa liar “Panduan Penanggulangan gangguan satwa liar gajah dengan manusia	Laporan Tahunan : Penanganan Konflik Manusia-Gajah dan Perlindungan Kawasan Hutan Berbasis SMART di Taman Nasional Way Kambas	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 48 / MENHUT-II / 2008
LAPORAN CAPAIAN RENJA (Laporan Tahunan)		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 53/ MENHUT-II / 2014

Sumber : diolah Penulis, 2018

3. Observasi

Menurut (Sujarweni, 2014:75) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2011:145). Penulis melakukan observasi di Taman Nasional Way Kambas dan pinggir kawasan terkait dengan penanggulangan gajah liar dan juga sarana-prasarana penghalau gajah liar yang akan masuk ke lahan perkebunan warga.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Setelah mendapat data yang diperoleh, maka Penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain menurut Nugroho (2016:42) sebagai berikut:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
2. Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
3. Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokan data berdasarkan jenis data.
4. Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.

5. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

Penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengolahan data yaitu:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
2. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data, dengan tujuan mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola ataupun kategori sehingga data yang diperoleh dapat terstruktur dengan baik, sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis sesuai dengan data yang diperoleh.

Kemudian dalam penelitian ini Penulis sejalan dengan pendapat Fuad (2014:16-18) Data-data dianalisis dimana prosesnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari *field notes* (catatan lapangan). Reduksi data perlu dilakukan karena Penulis semakin lama dikancah penelitian akan semakin banyak data atau catatan lapangan (*field note*) yang Penulis kumpulkan.

Tahap dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian yakni Implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Display data dapat membantu Penulis dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami

sebelumnya. Penelitian ini penyajian data menggunakan uraian singkat, gambar dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Sugiyono (2009:247) adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan pola-pola sudah tergambar dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, Penulis kemudian mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang fenomena yang kita teliti dan kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru, maka penelitian sudah dianggap selesai.

I. Teknik Validasi Data

Teknik validasi adalah teknik keabsahan atau kebenaran sebuah data yang telah didapatkan Penulis. Menurut Tresiana (2013:142) untuk menjaga tingkat kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk meminimalisir derajat kesalahan dan perlunya tindakan urgen Penulis untuk menghindari *validity threat* (bias/validitas semu/validitas palsu). Maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi.

Banyak cara untuk melakukan pengujian validitas data untuk mendapatkan data yang kredibel/shahih, seperti yang dilakukan (Emzir, 2010:79) mereka mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif dan secara eksplisit menawarkan sebagai alternatif dari kriteria yang lebih

berorientasi kuantitatif tradisional antara lain kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Teknik validasi pada penelitian ini menggunakan model triangulasi. Menurut Emzir (2010:82) triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda (misalnya, seorang kepala sekolah dan seorang siswa), jenis data (misalnya, catatan lapangan observasi dan wawancara) dalam deskripsi tema-tema dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya. Moleong (2015:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Pertama, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kedua, triangulasi metode menurut Patton dalam Moleong (2015:331) memiliki dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang ada.

Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan kemanfaatan Penulis atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Keempat, triangulasi teori, menurut Maleong (2015:131) mengatakan bahwa berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Pihak lain, Patton mengatakan bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan pembandingan (*rival explanation*).

Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, Penulis hanya menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan metode pengumpulan data. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara dari sumber pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi.
4. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan hasil dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas adalah satu dari dua kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Provinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). TNWK ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999, kawasan TNWK mempunyai luas lebih kurang 125,631.31 ha. Secara geografis Taman Nasional Way Kambas terletak antara $40^{\circ}37'$ – $50^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan antara $105^{\circ}33'$ – $105^{\circ}54'$ Bujur Timur. Berada di bagian tenggara Pulau Sumatera di wilayah Propinsi Lampung (BTNWK, 2012).

Kawasan hutan Way Kambas pada tahun 1924 disisihkan sebagai daerah hutan lindung, bersama dengan beberapa daerah hutan yang tergabung di dalamnya. Pendirian kawasan pelestarian alam Way Kambas dimulai sejak tahun 1936 oleh Resident Lampung, Mr. Rookmaker, dan disusul dengan Surat Keputusan Gubernur Belanda tanggal 26 Januari 1937 Stbl 1937 Nomor 38. Suaka Margasatwa Way Kambas pada tahun 1978 diubah menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts-7/1978 tanggal 10 Juli 1978 dan dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam (SBKPA).

Kawasan Pelestarian Alam diubah menjadi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang dikelola oleh SBKSDA dengan luas 130,000 ha dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/1985 tanggal 12 Oktober 1985. Pekan Konservasi Nasional di Kaliurang Yogyakarta, dideklarasikan sebagai Kawasan Taman Nasional Way Kambas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 tanggal 1 April 1989 dengan luas 130,000 ha.

Kemudian pada tahun 1991 atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 144/Kpts/II/1991 tanggal 13 Maret 1991 dinyatakan sebagai Taman Nasional Way Kambas, dimana pengelolaannya oleh Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas yang bertanggungjawab langsung kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjung Karang. Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas dinyatakan sebagai Balai Taman Nasional Way Kambas dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997 tanggal 13 maret 1997 (BTNWK, 2012).

Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam adalah untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai satwa liar, diantaranya adalah tapir (*Tapirus indicus*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), enam jenis primata, rusa sambar (*Cervus unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumtrae*), beruang madu (*Helacrtos malayanus*) dan badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatranus*).

Way Kambas yang statusnya pada saat itu sebagai Kawasan suaka margasatwa mengalami kerusakan habitat cukup berat akibat dibuka untuk Hak Pengusahaan Hutan hampir selama dua puluh tahun, terutama pada periode 1968– 1974. Kawasan ini beserta segala isinya termasuk satwa, banyak mengalami kerusakan. Jenis satwa tersebut, sampai dengan saat ini keberadaannya masih terjaga dengan baik, antara lain yang dikenal dengan The Big Five mammals yaitu tapir (*Tapirus indicus*), gajah sumatera (*Elephant maximus sumatranus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), badak sumatera (*Dicerorhinus sumatranus*) dan beruang madu (*Helarctos malayanus*).

B. Topografi

Kondisi topografi TNWK relatif datar sampai dengan sedikit bergelombang dibagian barat kawasan, dengan ketinggian 0-50 m dpl. Lokasi yang mempunyai ketinggian 50 meter diatas permukaan laut adalah sekitar kecamatan Purbolinggo. Pada bagian timur kawasan merupakan daerah lembah yang terpotong oleh sungai-sungai yang menyebabkan terbentuknya topografi bergelombang. Berdasarkan Peta Satuan Lahan dan Tanah Lembar Tanjungkarang, terdapat hampir 10 Satuan Peta Tanah. Tanah-tanah tersebut berkembang dari endapan aluvium dan endapan tufa masam. Jenis tanah paling luas adalah Podsolik, sedangkan jenis-jenis lainnya dijumpai dalam areal sempit, yaitu pada fisiografi aluvial dan marin.

Tanah jenis Podsolik mempunyai kandungan liat yang tinggi (lebih dari 30%). Tanah jenis ini mempunyai reaksi tanah masam, dengan kandungan Al (aluminium) yang tinggi, unsur hara rendah, sehingga diperlukan pengapuran dan pemupukan serta pengelolaan tanah secara intensif dan hati-hati. Jenis tanah podzolik mudah sekali menangkap air tapi relatif sulit untuk dimanfaatkan karena kandungan liat yang cukup tinggi, selain itu daya ikat tanah jenis tersebut cukup tinggi. Berdasarkan umur pembentukannya semakin ketimur mendekati wilayah pantai, rata-rata usia tanahnya relatif muda, sebagai hasil dari sedimentasi. Jenis tanah tersebut mudah terkena erosi.

C. Iklim, Suhu dan Kelembaban

1. Iklim

Besarnya curah hujan dimusim kemarau dari April/Mei-Oktober/November sangat bervariasi, sedangkan dimusim penghujan hanya sedikit variasinya. Selama musim kemarau, seluruh kawasan menerima curah hujan rata-rata sekitar 2,000 mm per tahun, yang berarti sedikit di bawah rata-rata curah hujan di kawasan pegunungan Sumatera yang berkisar antara 4.500 – 5.000 mm per tahun. Pada periode sepuluh tahunan, antara 1975 – 1984 menunjukkan rata-rata curah hujan adalah 2.496 mm per tahun. Curah hujan maksimum adalah 3.448 mm dan minimum adalah 1,548 mm pada tahun 1977 (BTNWK, 2012).

Rata-rata dalam satu periode, musim kemarau dalam satu tahun adalah tiga bulan, sedangkan musim penghujan adalah delapan bulan. Bulan Agustus dan September adalah musim kemarau relatif panas dibanding bulan lainnya. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, kawasan Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya termasuk dalam tipe iklim B, dengan musim kemarau secara umum berlangsung selama dua bulan (dapat berlangsung sampai enam bulan, yang terjadi sekali dalam dua puluh tahun).

2. Suhu dan kelembapan

Suhu dan kelembaban berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, tergantung pada tipe vegetasi. Daerah hutan primer, hanya terdapat sedikit variasi baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Variasi yang cukup tinggi terjadi pada kawasan terbuka seperti alang-alang dan hutan sekunder. Siang hari suhu relatif lebih tinggi dibandingkan di malam hari. Suhu yang tinggi ini menyebabkan vegetasi alang-alang cepat berkurang kandungan airnya sehingga mudah sekali terbakar. Suhu yang tinggi menyebabkan tanah mudah sekali kehilangan air akibat evaporasi langsung.

D. Desa Penyangga

Taman Nasional Way Kambas, secara administrasi berada di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, yang berbatasan langsung dengan 36 desa, pada 10 Kecamatan dan berada dalam tiga Kabupaten, yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Desa penyangga membentang dari wilayah selatan sampai ke utara yang terletak dibagian barat kawasan dan pada bagian timur dibatasi oleh pantai timur laut Jawa.

1. Demografi

a. Struktur penduduk

Keadaan penduduk daerah penyangga disekitar Taman Nasional Way Kambas, berdasarkan struktur seks ratio atau jenis kelamin, terdapat kecenderungan bahwa, kuantitas penduduk perempuan dewasa lebih besar daripada penduduk laki-laki dewasa. Struktur tersebut berbeda dengan kecenderungannya dengan penduduk pada usia anak-anak. Rata-rata pada anak laki-laki lebih besar daripada penduduk anak-anak perempuan.

b. Kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di daerah sekitar Taman Nasional relatif rendah. Desa yang mengelilingi kawasan TNWK sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduknya berada pada kisaran 200-300 orang/km². Jumlah penduduk terbesar berada di

Desa Rantau Jaya Udik II dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Labuhan ratu IX, dengan pertumbuhan penduduk 0.9 %.

E. Sosial Ekonomi

1. Sosial budaya

Penduduk yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang berada disekitar Taman Nasional Way kambas secara garis besar dapat di bagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat keberadaannya, yaitu: penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli sebagian besar berada di Kecamatan Sukadana dan Way Jepara. sedangkan, penduduk pendatang dari Jawa dan Bali menyebar hampir diseluruh Kecamatan yang ada di sekitar kawasan.

Penduduk pendatang lainnya seperti Melayu, Bugis, Serang, dan Batak banyak bermukim di daerah Pesisir. Sebagian besar penduduk tersebut \pm 95% memeluk agama Islam, sedangkan sisanya beragama Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Aliran Kepercayaan. Sedangkan secara proporsional penduduk yang tinggal di desa-desa penyangga, sampai saat ini masih didominasi oleh para pendatang terutama dari pulau Jawa, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sebagian kecil Bali. Kedatangan pendatang tersebut diawali dengan adanya program kolonilasi oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan yang dikenal dengan Transmigrasi. Sebagian besar desa yang berbatasan dengan kawasan

merupakan hasil pengembangan desa induknya yang bukan daerah transmigrasi.

2. Ekonomi

a. Pola penggunaan lahan

Daerah penyangga yang berada disekitar TN. Way Kambas, hampir secara keseluruhan peruntukannya digunakan untuk lahan pertanian baik oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan yang bergerak bidang pertanian/perkebunan. Sesuai dengan keadaan penduduk yang ada pola penggunaan lahan secara garis besar terbagi menjadi dua. Penduduk asli pada umumnya menggunakan lahannya melalui pola pertanian lahan kering. Pola pertanian lahan kering ini berupa kebun lada, kelapa, durian, karet, kelapa sawit dan singkong.

Pola penggunaan lahan basah berupa pesawahan banyak dilakukan oleh penduduk pendatang, khususnya penduduk yang berasal dari Jawa. Lahan pemukiman selain sebagai tempat tinggal, juga diusahakan sebagai pekarangan dengan tanaman kebutuhan sehari-hari. Khusus untuk daerah penyangga pemanfaatan lahan kering terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu singkong dan tanaman perkebunan seperti karet dan sawit. Daerah yang mengalami gangguan gajah dengan frekwensi cukup tinggi jenis tanaman dipilih untuk jenis yang tidak disukai gajah.

b. Struktur perekonomian

Struktur perekonomian ditentukan oleh peranan sektor-sektor ekonomi yang ada dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dan nilai tambah yang dicapai oleh setiap sektor ekonomi memberi gambaran besarnya ketergantungan suatu daerah terhadap produk produk tersebut. Peran sektor pertanian masih mendominasi dalam struktur perekonomian di daerah sekitar Taman Nasional Way kambas, sedangkan sektor industri dan jasa masih belum memberikan peranan yang penting.

Sektor perdagangan masih berkisar kepada usaha perdagangan kecil. Dominasi terbesar berasal dari sektor pertanian yang diperoleh dari lahan marginal, hal ini membawa permasalahan tersendiri yaitu hasil produksi yang rendah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat sebagian besar belum mengalami perbaikan yang diharapkan.

F. Mitra Kerja

Konservasi tidak hanya menjadi bagian kewajiban dari pemerintah saja, namun juga menjadi tanggungjawab semua pihak. Berbagai tantangan dan kendala dalam mengelola flora, fauna dan ekosistemnya perlu dilakukan secara bersama-sama melalui kerjasama dengan para pihak. Para pihak yang peduli dan terlibat dalam pengelolaan kawasan TN Way Kambas, yaitu:

1. Yayasan Badak Indonesia/YABI, adalah lembaga swadaya masyarakat yang mendukung tugas TNWK dalam rangka menangani konservasi badak Sumatera. Penangkaran badak secara semi-insitu dilaksanakan oleh SRS, sedangkan tugas pengamanan habitat dan populasi di alam dilakukan oleh Rhino Protection Unit/RPU. SRS dan RPU telah beroperasi sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.
2. Program Konservasi Harimau Sumatera/PHKS, adalah lembaga yang mempunyai program untuk mendukung TNWK yang bergerak dalam rangka konservasi harimau Sumatera. Kegiatan yang dilakukan antara lain, pemantauan populasi melalui pemasangan jebakan foto “camera trap” untuk pengamanan habitat dan populasi. PHKS membentuk unit pengamanan harimau/TPU yang dipimpin oleh Polhut TNWK. Mitra ini telah melaksanakan kerja sama dengan TNWK sejak tahun 1995.
3. *Wildlife Conservation Societies/WCS*, Lembaga swadaya ini sejak tahun 2000 telah terlibat aktif dalam mendukung pengelolaan satwa liar gajah Sumatera. Kegiatan yang dilakukan antara lain survey populasi gajah liar di alam, melaksanakan penanggulangan konflik gajah dengan manusia. Fokus kegiatan adalah mencari metode penanggulangan biaya rendah. Masyarakat telah membentuk kelompok swadaya masyarakat/KSM dan Forum Kepala Desa Penyangga yang terdapat konflik untuk menyatukan dan menyamakan persepsi dalam rangka penguatan kelembagaan tingkat desa.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas dari tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi, selama gangguan gajah liar terjadi dan setelah gangguan gajah liar terjadi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan gajah liar yang ada pada tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi dapat disimpulkan bahwa implementasinya kurang baik, terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu belum semua titik-titik rawan konflik yang dilalui gajah liar sudah terpasang alat deteksi ataupun alat penghalau gajah liar, selanjutnya pada kegiatan melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah-wilayah lain yang mengalami konflik satwa liar saat ini terkendala karena Bupati Lampung Timur belum menunjuk kembali OPD yang berwenang terhadap konflik gajah manusia di TNWK sejak ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kegiatan-kegiatan yang ada pada tahap saat gangguan gajah liar terjadi telah dilaksanakan dengan baik, para pelaksana kebijakan penanggulangan gajah liar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan gajah liar sesuai dengan pedoman yang ada. Tahap ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapat pada tahap setelah gangguan gajah liar terjadi.
3. Pelaksanaan kegiatan pada tahap setelah gangguan gajah liar terjadi juga telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik sesuai dengan pedoman yang ada, namun terdapat sedikit kekurangan terkait dengan belum adanya kejelasan terkait dengan rehabilitasi dan kompensasi untuk masyarakat yang perkebunannya dirusak oleh gajah liar. Meskipun demikian, sejak diterbitkannya SOP penanggulangan gajah liar tercatat bahwa konflik gajah liar dengan manusia telah berkurang.

Berikut merupakan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas antara lain:

1. Belum adanya OPD (organisasi perangkat daerah) yang berwenang untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi
2. Faktor Cuaca yang tidak Menentu (Musim Hujan)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Balai Taman Nasional Way Kambas harus berkoordinasi dengan mitra-mitra kerjanya yaitu ERU, WCS-IP, MMP dan juga masyarakat agar mengupayakan pemasangan alat deteksi gajah liar atau alat penghalau gajah liar seperti drum putar berduri, pagar kawat berduri dan bronjong batu di setiap desa penyangga agar gajah liar kesulitan untuk memasuki perkebunan masyarakat dan mengurangi resiko konflik gajah manusia.
2. Bupati Lampung Timur seharusnya segera merevisi SK (surat keputusan) tentang OPD (organisasi penangkat daerah) yang saat ini sudah tidak berlaku lagi akibat ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menunjuk kembali OPD yang dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendukung penanggulangan konflik gajah liar dengan manusia di TNWK.
3. Balai Taman Nasional Way Kambas sebagai pengelola TNWK harus bisa mengupayakan agar pihak-pihak dari lingkungan eksternal yang belum terlibat dalam penanggulangan gajah liar agar bisa turut mendukung proses penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas.

4. Pemerintah pusat maupun Pemerintah provinsi seharusnya memberikan kompensasi kepada masyarakat yang perkebunannya rusak akibat konflik gajah liar dengan manusia di TNWK, hal ini dikarenakan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat gajah liar tidak sedikit dan sangat membebani masyarakat desa sekitar TNWK.

5. Pemerintah provinsi maupun kabupaten harus mengambil kebijakan untuk melakukan relokasi desa-desa sekitar Taman Nasional Way Kambas, karena luas Taman Nasional Way Kambas saat ini tidak cukup sebagai tempat yang digunakan untuk konservasi satwa liar. Selain itu, kebijakan tersebut juga diambil agar konflik gajah liar dengan manusia di Taman Nasional Way Kambas tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin. Said Zainal. 2012. *Kebijakan publik*. Jakarta : salemba humanika
- Agustino. Leo . 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung : ALFABETA, cv.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Alikodra S. Hadi .2010. *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati indonesia*. Bandung : IPB Press
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017*. Buku. Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI. Jakarta. 31 p.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fischer, Frank dkk. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*. Pennsylvania: CRC Press.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.

- Madani, Muhlis. 2011. *Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moekijat. 1995. *Analisis kebijakan publik*. Bandung : Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang: Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Primack RB, Supriatna J, dan Indrawan M, Kramadibrata P. 1998. *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Subarsono. 2016. *Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Suharno. 2013. *Pembelajaran kebijakan publik*. Yogyakarta: penerbit ombak
- Suharto. Edi. 2014. *Analisis kebijakan publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung : ALFABETA, cv.
- Sukmantoro W., Syamsuardi., Sudibyo., dan Adan Suprahman. H. 2011. *Desain Kanal atau Parit Gajah sebagai bagian dari teknik mitigasi konflik Gajah-Manusia di Tesso Nilo Propinsi Riau*. 15 Juni 2011 .
[//www.academia.edu/3125669/Desain_Kanal_atau_Parit_Gajah_sebagai_bagian_dari_teknik_mitigasi_konflik_Gajah_Manusia_di_Tesso_Nilo_Propinsi_Riau](http://www.academia.edu/3125669/Desain_Kanal_atau_Parit_Gajah_sebagai_bagian_dari_teknik_mitigasi_konflik_Gajah_Manusia_di_Tesso_Nilo_Propinsi_Riau). Diakses pada 17 Maret 2016.
- Tanudimadja. 1978. *School Of Environmental Conservation Management*. Ciawi , Bogor
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : teori dan proses edisirevisi*. Yogyakarta : media presindo

Sumber Lain:

Yogasara, F A., Zulkarnaini, Saam Z. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Konflik Antar Gajah Dengan Manusia di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol.4 No.1:63-81

PratamaM. Dedy Sukmara dan Bainah Sari Dewi. 2012. *Mitigasi Konflik Manusia Dan Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus Temminck, 1847) Menggunakan Gajah Patroli Di Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Jurnal sains MIPA. Vol. 18, No. 3

Nuryasin, Defri Yoza, Kausar. 2014 . *DINAMIKA DAN RESOLUSI KONFLIK GAJAH SUMATERA(Elephas maximus sumatranus) TERHADAP MANUSIA DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS*. Jurnal Jom Faperta Vol.1 No 2

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 48 / MENHUT-II / 2008

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 53/ MENHUT-II / 2014

Petunjuk Praktis Mitigasi Konflik Satwa Liar : *Panduan Penanganan Gangguan Satwa Liar Gajah-Manusia*

LAPORAN RENJA TAHUN 2017 BALAI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS